



Media: Radar

Hari: Rabu

Tanggal: 21 April 2021

Halaman: 1

Pengelolaan TIK Menjadi Raperda Inisiatif DPRD Kota Jogja

Dukung Smart City, 2022 Seluruh RW Dilengkapi Fasilitas Wifi

Rancangan peraturan daerah (raperda) yang diprakarsai DPRD Kota Jogja terus bertambah. Kini ada satu raperda yang tengah serius dibahas. Raperda itu tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

"TUJUAN pengelolaan dan pemanfaatan TIK untuk meningkatkan pelayanan internal pemerintah daerah dan pelayanan publik," ujar Ketua Pansus Raperda Pengelolaan TIK Bambang Seno Baskoro dalam perbincangan dengan koran ini kemarin (20/4). Selain itu, mewujudkan pemerintahan berbasis data yang terintegrasi antar perangkat daerah, kecamatan dan kelurahan. Juga sinergi pembangunan dan tata kelola TIK. Kemudian meningkatkan kemudahan akses layanan TIK bagi masyarakat.

Seno mengatakan, pansus telah menggelar *ekspose*. Raperda yang diprakarsai parlemen itu seluruhnya terdiri atas 31 pasal dan XI bab. "Pembahasan kami sekarang telah masuk pasal demi pasal," urai wakil rakyat yang tinggal di Gondokusuman, Kota Jogja ini.



Dalam raperda itu diatur kewajiban pemerintah daerah menyusun perencanaan TIK. Perencanaan itu diwujudkan dalam Rencana Induk TIK. Berlaku selama lima tahun. Rencana induk dapat diubah dengan berbagai pertimbangan.

Antara lain, rencana induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), perkembangan teknologi, perubahan perangkat daerah dan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ■

► *Baca Dukung... Hal 7*

KUNJUNGAN KERJA: Ketua Pansus Raperda Pengelolaan TIK Bambang Seno Baskoro (kiri) menyerahkan souvenir saat berkunjung ke Kabupaten Magetan, Jawa Timur.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
----------	--------------	-------	---------------

Dukung Smart City, 2022 Seluruh RW Dilengkapi Fasilitas Wifi

Sambungan dari hal 1

Berbicara soal RPJMD, Seno mengatakan setelah nanti disahkan, Perda Pengelolaan TIK menjadi payung hukum bagi Pemkot Jogja.

Saat ini Pemkot tengah membangun sejumlah infrastruktur TIK di tingkat wilayah. Misalnya dengan memberikan fasilitas *Wireless Fidelity* (Wifi) atau media pengantar komunikasi data tanpa kabel yang bisa dipakai untuk komunikasi.

Atau bisa mentransfer program BBM dan data dengan kemampuan yang sangat cepat. Wifi itu telah dipasang di beberapa titik seperti di kampung atau rukun warga (RW). "Kami targetkan 2022, seluruh RW sudah dilengkapi fasilitas WiFi," tambah Seno. Target itu juga sesuai dengan RPJMD Kota Jogja.

Menurut Seno jumlah RW ada

sebanyak 600. Dalam dua tahun ini pembangunan sarana prasarana terkait TIK dapat diselesaikan. "Perda TIK menjadi payung hukum pembangunan dan pengembangan infrastruktur TIK," lanjutnya.

Pemanfaatan TIK, sambung politisi Partai Golkar ini, untuk mendukung kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik. Di samping itu, penanganan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Tugas Polri dalam mewujudkan peningkatan kualitas ketertiban dan keamanan masyarakat. Selanjutnya, pendidikan, pengembangan kualitas hidup serta kesejahteraan sosial masyarakat. "Kami ingin mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan literasi digital," bebernya. Dengan begitu keberadaan perda tersebut dapat ikut mencerdaskan kehidupan masyarakat

dalam mengonsumsi informasi melalui pemanfaatan TIK.

Seno mengakui rata-rata tingkat pemahaman masyarakat Kota Jogj akan hak publiknya sangat tinggi. Kecintaan sebagai rasa memiliki terhadap kotanya sangat luar biasa. Ini menuntut Pemkot memberikan kualitas pelayanan yang memadai seiring tingkat ekspektasi warganya.

Pemanfaatan TIK diyakini memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan. Termasuk dengan difasilitasinya seluruh RW dengan perangkat Wifi. Proses belajar mengajar di sekolah maupun perguruan tinggi yang memakai sistem daring di masa pandemi akan sangat terbantu. "Harapannya tidak ada lagi kendala," kata anggota dewan tiga periode ini.

Seno menambahkan, keberadaan Perda Pengelolaan TIK ini mendukung tahapan menuju

Kota Cerdas. Atau populer disebut Smart City. "Kota Jogja relatif sudah menapak ke sana. Kita sudah melewati fase awal dengan terwujudnya jaringan fiber optik dan nirkabel," tandasnya.

Di bagian lain pimpinan dan anggota pansus Raperda Pengelolaan TIK juga telah mengadakan studi komparasi ke Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Di kabupaten tersebut telah memiliki Perda tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). "Bedanya di Magetan ini karena kabupaten ada alokasi dana desa. Ini yang tidak dimiliki Kota Jogja," terangnya. Kunjungan diadakan pada Selasa (14/4) dan diterima Asisten Administrasi Umum Iswahyudi Yulianto didampingi Kepala Bidang TIK Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan Sigit Sukanto. (kus/pr/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat DPRD Kota 2. Bagian Hukum 3. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005